



# Sekolah Lima Hari Dikaji Ulang

JAKARTA—Aturan sekolah lima hari selama delapan jam per hari, yang rencananya diberlakukan pada Juli 2017 bakal dikaji ulang.

Harian Jogja  
[redaks@harianjogja.com](mailto:redaks@harianjogja.com)

- ▶ DPR merekomendasikan agar aturan sekolah delapan jam per hari dikaji ulang.
- ▶ Data Kemendikbud menyebutkan ada 1.800 sekolah yang dinyatakan siap menerapkan aturan sekolah delapan jam per hari.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebut salah satu yang menjadi pertimbangan adalah rekomendasi saat rapat (raker)

bersama Komisi X DPR.

Sebelumnya Kemendikbud telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)

No.23/2017 tentang Hari Sekolah. Pasal 2 Permendikbud tersebut mengatur hari sekolah dilaksanakan delapan jam dalam satu hari atau 40 jam selama lima hari dalam satu minggu.

Kemendikbud mengatakan aturan ini merupakan pendidikan karakter dalam delapan jam. "Kami kan ada rekomendasi raker dengan Komisi X, jelas bahwa di situ dikaji ulang. Pasti kami kaji ulang karena tidak mungkin

kalau Komisi X bilang begitu terus kami enggak kaji ulang," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ari Santoso, dalam sebuah acara diskusi Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (17/6).

Soal kemungkinan adanya revisi terkait Permendikbud No.23/2017 itu, Ari Santoso belum dapat memastikan. "Dikaji ulang banyak probabilitasnya," jawabnya.

Ari mengatakan sebenarnya ada kesalahan persepsi tentang Permendikbud ini. "Tahun lalu sangat beda, yang dimasalahkan kata *full day*, seolah anak-anak disuruh di sekolah. Padahal dalam Permen ini adanya penguatan pendidikan karakter. Tidak ada satu pun menambah pelajaran dalam pendidikan karakter," ujar Ari.

● Lebih Lengkap Halaman 9

### Sekolah Lima...

Kemendikbud melihat, dalam kurikulum Indonesia, terlalu banyak mata pelajaran, sehingga anak-anak dinilai kurang bahagia di sekolah. Sedangkan niat pemerintah dalam Permen No.23/2017 bukan fokus pada kegiatan belajar-mengajar, melainkan menambah waktu bermain.

Pendidikan disebut terdiri atas hubungan di antara tiga komponen, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tidak seluruh pendidikan diserahkan ke sekolah. "Pandangannya sebenarnya bukan menambah jam. Ini kalau seluruh ekstrakurikuler dan kokurikuler semuanya di sekolah, padahal bisa kerja sama dengan yang lain. Seperti dengan diniah. Persepsi semua dilakukan di sekolah dan *full day* itu yang bikin ribut, mispersepsi. Jadi perlu kami pertajam ke masyarakat," tutur Ari.

Anggota Komisi X DPR Bidang Pendidikan Ledia Hanifah Amaliah mengatakan DPR memang meminta aturan sekolah delapan jam dikaji ulang. "Ada beberapa pilihan, silakan. Sebenarnya domain pemerintah dalam membuat regulasi. Pemerintah harus mengkaji ulang. Bahwa nanti hasilnya bisa direvisi atau tidak dilaksanakan itu bisa terjadi," tuturnya.

Urgensi pengkajian ulang ini, disebut Ledia, soal pasal yang dinilai bertentangan yaitu Pasal 1 dan Pasal 9. Aspek lainnya adalah pertimbangan Permen terkait kondisi sosial-kultural masyarakat.

"Kita tidak menolak pendidikan karakter. Tapi strateginya harus tepat, bahwa distribusi normal siswa kita seperti apa. Tapi tidak boleh melupakan yang disabilitas, keluarga miskin, tidak bisa sekolah, atau di sekolah terbuka," ujarnya.

Ledia menambahkan jika Permen ini akan diterapkan, perlu ada perbaikan dari kesalahan pengajar sebagai fasilitator. "Harus diyakinkan, dipastikan supaya guru-guru bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan. Berapa banyak guru yang sudah tersertifikasi sekalipun,

belum tentu punya kemampuan. Jadi harus difasilitasi dulu," ujar politikus PKS ini.

Ia kemudian mengimbau pemerintah tidak melihat satu daerah saja sebagai acuan penerapan peraturan ini. Hal lain, keluarga di Indonesia masih banyak yang membutuhkan peran anak dalam membantu keluarga.

"Sosiobudaya keluarga-keluarga di Indonesia masih perlu bantuan anak-anak untuk membantu ekonomi keluarga. Misalnya orang tua punya warung, pulang sekolah anaknya jaga warung. Ini kan melibatkan anak dalam keluarga," ucap Ledia.

### KPAI Mengancam

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut aturan tentang kebijakan sekolah delapan jam sehari dari Senin hingga Jumat yang dikeluarkan Kemendikbud kurang tepat jika ditujukan untuk penguatan karakter. KPAI mendesak Kemendikbud segera merevisi atau bahkan mencabut aturan tersebut.

"Penguatan pendidikan karakter ya, tapi harus dengan cara yang baik. Tak hanya tujuan yang baik, tujuan diturunkan dengan instrumen yang baik, Permendikbud ini tidak. Di samping tujuan yang baik, caranya juga harus baik. Jangan ada residu yang muncul sehingga merusak tatanan masyarakat," kata Ketua KPAI Asrorun Ni'am kemarin.

KPAI telah mengkaji Permendikbud No.23/2017 itu. Hasilnya, jika Kemendikbud tak merevisi atau mencabut aturan kebijakan hari sekolah ini, KPAI akan mengajukan *judicial review* (uji materi) ke Mahkamah Agung.

Staf Ahli DPP PGRI Jejen Musfah menyebut Permendikbud ini bagus untuk menguatkan karakter siswa. Namun dia mengatakan peraturan ini jangan sampai mematikan institusi pendidikan lain, seperti madrasah diniah.

"Dalam hal kontra delapan jam di

sekolah akan beririsan dengan waktu belajar di madrasah diniah. Saya kira ini persoalan perlu didiskusikan lebih lanjut agar apa yang tertuang dalam regulasi tak berbenturan dengan apa yang sudah stabil dilaksanakan madrasah diniah. Jangan sampai menghanguskan yang sudah eksis," ucap Jejen.

Sementara itu pemerhati perempuan dan anak Giwo Rubianto Wiyogo mengatakan layanan sekolah jangan dipaksakan seragam karena sosiokultural masyarakat Indonesia yang beragam.

"Sistem layanan sekolah jangan dipaksakan seragam. Berikan kebebasan kepada masing-masing sekolah untuk memilih dan mengembangkan model sekolah," ujar Giwo di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan sekolah selama lima hari dalam seminggu atau delapan jam sehari tidak tepat jika diberlakukan di seluruh Indonesia. "Untuk konteks Jakarta, tidak masalah. Tetapi bagaimana dengan anak-anak di desa yang dari sisi transportasi terbatas."

Pendidikan karakter pada anak, lanjut dia, tidak hanya bisa diberikan melalui sekolah lima hari tetapi harus disesuaikan dengan budaya dan latar belakang anak. "Lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal," kata dia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai tahun ajaran 2017/2018 akan menerapkan sekolah selama lima hari dalam seminggu di sejumlah sekolah. Sekolah yang ditunjuk merupakan sekolah-sekolah yang siap secara infrastruktur serta sarana dan prasarana.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, menyebutkan ada sekitar 1.800-an sekolah yang siap. "Sekolah yang ikut menerapkan sekolah lima hari itu, hanya sekolah-sekolah yang menyatakan siap," kata Hamid. (JIBI/Antara/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005